

**LAPORAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TAHUN 2016**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat yang masuk terkait pemberian layanan di BKPM.

Kebijakan penanganan pengaduan masyarakat telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Terdapat beberapa sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, informasi, ketidakpuasan, dan/atau aspirasi dari seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan di BKPM, antara lain melalui *desk pengaduan*, kotak pengaduan, email, telepon, laman “pengaduan masyarakat” di website BKPM, laman Lapor serta media sosial.

Selama Tahun 2016, sebanyak 1268 (seribu dua ratus enam puluh delapan) pengaduan masyarakat telah masuk melalui berbagai sarana pengaduan. Semua pengaduan tersebut telah selesai ditindaklanjuti.

Ruang lingkup pengaduan masyarakat selama Tahun 2016 meliputi keluhan keterlambatan terkait persetujuan perizinan dan ketidakjelasan perkembangan proses permohonan perizinan karena proses di instansi terkait belum *online* dan belum tersedia SOP yang baru.

Tindak Lanjut :

BKPM telah menindaklanjuti permasalahan tersebut di atas dengan mengadakan perbaikan secara terus-menerus dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan SOP yang dilimpahkan ke BKPM.

Demikian laporan penanganan pengaduan masyarakat di BKPM selama Tahun 2016. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

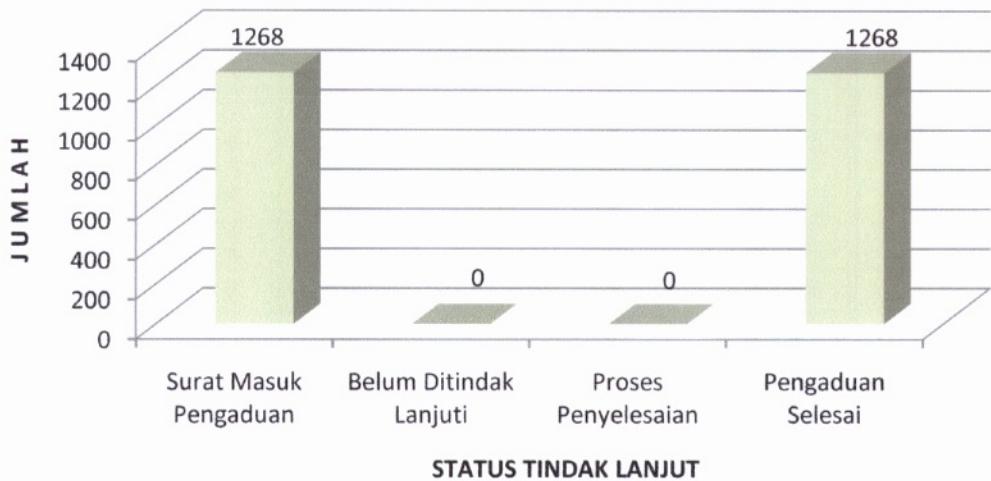
Jakarta, 17 JAN 2017

Inspektur,

Slamet Purwo Santoso



STATUS TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE JANUARI - DESEMBER 2016



JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE JANUARI - DESEMBER 2016

